

**FUNGSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI MASA PANDEMI
TERHADAP MASYARAKAT DI DESA BELANG-BELANG KECAMATAN
KALUKKU KABUPATEN MAMUJU**

***THE FUNCTION OF BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA IN PANDEMIC
TIMES TOWARDS THE COMMUNITY IN BELANG-BELANG VILLAGE,
KALUKKU DISTRICT, MAMUJU REGENCY***

SKRIPSI

RIZKI MAULANA JASWANDI

E411 16 302



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

**FUNGSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI MASA PANDEMI TERHADAP
MASYARAKAT DI DESA BELANG-BELANG KECAMATAN KALUKKU
KABUPATEN MAMUJU**

SKRIPSI

RIZKI MAULANA JASWANDI

E411 16 302



**SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA
DEPARTEMEN SOSIOLOGI**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**FUNGSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI MASA
PANDEMI TERHADAP MASYARAKAT DI DESA BELANG-BELANG
KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU**

Disusun dan diajukan oleh

(RIZKI MAULANA JASWANDI)

(E411 16 302)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 01 Maret 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Arsyad Genda, M.Si
NIP. 19630310 199002 1001

Pembimbing II



Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si
NIP. 19651016 199002 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Sosiologi

FISIP Unhas



Dr. Husbi, M.Si, Ph.D

NIP. 19630827 199103 1 003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Skripsi ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Evaluasi Skripsi pada

Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Hasanuddin

Oleh:

JUDUL : Fungsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Masa Pandemi
Terhadap Masyarakat Di Desa Belang-Belang Kecamatan
Mamuju Kabupaten Mamuju

NAMA : RIZKI MAULANA JASWANDI

NIM : E411 16 302

Pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 01 Maret 2022

Tempat: Ruang Ujian Departemen Sosiologi

TIM EVALUASI SKRIPSI

KETUA : Drs. Arsyad Genda, M.Si

(.....)

SEKRETARIS : Arini Enar Lestari AR, S.Pd., M.Sos

(.....)

ANGGOTA :

1. Dr. Muh. Iqbal Latief M.Si

(.....)

2. Dr. Mansyur Radjab M.Si

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : RIZKI MAULANA JASWANDI

NIM : E411 16 302

**JUDUL : FUNGSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI
MASA PANDEMI TERHADAPA MASYARAKAT DI
DESA BELAN-BELANG KECAMATAN KALUKKU
KABUPATEN MAMUJU**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 01 Maret 2022
Yang Menyatakan



Rizki Maulana Jaswandi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim...

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada kedua orangtua tercinta yang telah membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai.

Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, kesabaran dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan untuk penulis. Semoga Bapak dan Ibu Selalu diberikan Kesehatan dan umur yang panjang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas kehendak-Nya sehingga penulis dapat melalui masa perkuliahan dan penyusunan skripsi yang berjudul “*Fungsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Masa Pandemi Terhadap Masyarakat Di Desa Belang-Belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Kepada **Drs. Arsyad Genda, M.Si** selaku pembimbing I terimakasih atas kepercayaan dan bimbingannya selama ini yang tanpa lelah membimbing dan mengarahkan bagaimana menulis dan menyusun skripsi yang baik dan benar. **Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si** selaku pembimbing II dan penasehat akademik, terimakasih untuk setiap waktu yang telah diberikan pada saya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, tanpa lelah membimbing dan mengarahkan bagaimana menulis dan menyusun skripsi dengan benar. Ucapan terima kasih juga sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Orang Tua Penulis **Bapak Jasman** dan **Ibu Wahida Ilyas** yang amat penulis cintai, Terimakasih karena telah melahirkan, membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, kepercayaan serta doa yang senantiasa mengadahi demi kehidupan penulis yang lebih baik.
2. **Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan sekaligus Dosen Departemen Sosiologi FISIP Unhas Makassar.

3. **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
4. **Drs. Hasbi, M.Si., Ph.D** selaku Ketua Departemen Sosiologi dan **Dr. M. Ramli AT, M.Si** selaku Sekretaris Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik penulis dalam menempuh studi S1 di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu.
6. Semua Staf karyawan Departemen Sosiologi.
7. Terimakasih kepada **Khairunnisa** yang telah menemani penulis dari awal hingga skripsi ini selesai, terimakasih atas *support* yang telah diberikan ketika penulis berulang kali merasa ragu dan *down* dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
8. Kepada **Saldi, Ferdi, Aguri** yang telah menyemangati penulis dengan cara yang berbeda-beda. Terimakasih karena selalu ada ketika penulis memerlukan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada **Kak Andi, Om Asraruddin, Ansar** dan **Surya** yang telah membantu penulis selama masa penelitian. Terimakasih telah meluangkan waktu untuk menemani penulis selama pengumpulan data lapangan.
10. **Socrates'16** selaku teman angkatan yang sudah seperti keluarga dalam menempuh pendidikan di Departemen Sosiologi FISIP Unhas. Terima kasih untuk solidaritas serta kebersamaan selama proses perkuliahan maupun berorganisasi.

11. Keluarga besar **Kemasos FISIP Unhas** yang juga mewadahi penulis untuk belajar banyak hal. Terima kasih untuk setiap pengajaran dan kekeluargaan yang selama ini penulis rasakan selama berkuliah serta dedikasi dan edukasi dalam berorganisasi di Universitas Hasanuddin. Terimakasih telah membuat penulis memiliki banyak pengalaman di bidang lain seperti menjadi sekretaris, menjalankan kepanitiaan dan pengalaman-pengalaman lain yang tidak penulis dapatkan di dalam kelas. *Salam Bumi Hijau Kemasos, Bersatu dalam Kebenaran.*
12. Informan yang telah memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini berakhir.
13. Terimakasih untuk teman-teman semuanya yang tidak sempat dituliskan namanya satu per satu. Motivasi, *support* dan pelajaran yang penulis dapatkan akan senantiasa membekas dalam ingatan penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 01 Maret 2022

Rizki Maulana J

ABSTRAK

Rizki Maulana Jaswandi, E411 16 302, Judul Skripsi “Fungsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Terhadap Masyarakat di Desa Belang-Belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju”. Dibimbing oleh Arsyad Genda dan Muh Iqbal Latief. Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi dan fungsi dari BLT Dana Desa untuk masyarakat di Desa Belang-Belang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, di mana peneliti menggambarkan informasi seputar bagaimana implementasi kebijakan dan fungsi BLT Dana Desa dalam mengurangi dampak sosial ekonomi Covid-19 di Desa Belang-Belang dan dijabarkan melalui informasi yang diperoleh dari informan.

Informan dari penelitian ini sebanyak 8 orang, ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan mengacu pada pedoman wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial terbesar yang ditimbulkan oleh Covid-19 ialah dampak ekonomi. Dampak ekonomi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan namun juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di desa, salah satu desa yang terdampak selama masa pandemi Covid-19 ialah Desa Belang-Belang. Selama masa pandemi masyarakat banyak yang terdampak dalam menurunnya jumlah pendapatan dan penghasilan, bahkan hingga tidak memiliki pemasukan sama sekali untuk beberapa bulan dikarenakan peraturan PSBB dan PPKM yang sempat diberlakukan oleh pemerintah. Untuk mengurangi dampak Covid-19 di Desa, pemerintah memberikan bantuan dalam program BLT-Dana Desa. Proses implementasi BLT-Dana Desa menawarkan hal-hal yang menjadi kebutuhan untuk masyarakat, menjalankan proses penyaluran bantuan dengan baik, dan tetap mengikuti syarat dan kriteria untuk calon penerima manfaat. BLT-Dana Desa menyediakan fungsi-fungsi seperti fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan yang mana menjadikannya sebagai fungsi manifes yang diantisipasi. Selain dari hal-hal yang diantisipasi BLT-Dana Desa memunculkan masalah-masalah baru seperti kecemburuan sosial dan disfungsi dalam pembangunan infrastruktur desa.

Kata Kunci: BLT Dana Desa, Covid-19, Implementasi Kebijakan, Fungsi

ABSTRACT

Rizki Maulana Jaswandi, E411 16 302, Thesis Title "Functions of Direct Village Fund Cash Assistance in a Pandemic Period to Communities in Belang-Belang Village, Kalukku District, Mamuju Regency". Supervised by Arsyad Genda and Muh Iqbal Latief. Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

The purpose of this study was to determine the implementation process and function of the Village Fund BLT for the community in Belang-Belang Village. This study uses a qualitative descriptive research method, where the researcher describes information about how the implementation of policies and functions of the Village Fund BLT in reducing the socio-economic impact of Covid-19 in Belang-Belang Village and elaborated through information obtained from informants.

There were 8 informants from this study, determined using purposive sampling technique with predetermined criteria. The data collection technique was conducted by interview with reference to the interview guide.

The results show that the biggest social impact caused by Covid-19 is the economic impact. The economic impact is not only felt by urban communities but also by people in villages, one of the villages affected during the Covid-19 pandemic is Belang-Belang Village. During the pandemic period, many people were affected by the decrease in the amount of income and income, even to the point of not having any income at all for several months due to the PSBB and PPKM regulations that were imposed by the government. To reduce the impact of Covid-19 in the village, the government provided assistance in the BLT program -Village Fund. The BLT-Dana Desa implementation process offers things that are needed by the community, runs the aid distribution process well, and still follows the terms and criteria for potential beneficiaries. The BLT-Dana Desa provides functions such as the function of Education, Health, and welfare which make it an anticipated manifest function. Apart from the things anticipated, the BLT-Dana Desa raises new problems such as social jealousy and dysfunction in village infrastructure development.

Key Words: BLT-Dana Desa, Covid-19, Policy Implementation, Function

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
LEMBAR	PENGESAHAN	SKRIPSI
Error! Bookmark not defined.		
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	ii	
PERNYATAAN	KEASLIAN	SKRIPSI
Error! Bookmark not defined.		
HALAMAN PERSEMBAHAN	v	
KATA PENGANTAR	vi	
ABSTRAK	ix	
ABSTRACT	x	
DAFTAR ISI	xi	
BAB I PENDAHULUAN	1	
A. Latar Belakang	1	
B. Rumusan Masalah	9	
C. Tujuan Penelitian.....	10	
D. Manfaat Penelitian.....	10	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	10	
A. Struktural Fungsional.....	10	
B. Perubahan Sosial	18	
C. Konsep Implementasi	21	
D. Bantuan Langsung Tunai (BLT)	23	
E. Konsep Pedesaan.....	25	
F. Penelitian Terdahulu.....	29	
G. Kerangka Konseptual.....	37	

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
B. Tipe dan Dasar Penelitian	39
C. Teknik Penentuan Informan.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
A. Sejarah Desa Belang-belang.....	46
B. Letak Demografis dan Geografis.....	47
C. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Belang-Belang	48
D. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	51
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Identitas Informan	53
B. Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 Terhadap Masyarakat Desa Belang-Belang	56
C. Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Belang-Belang.....	63
D. Fungsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	80
BAB VI PENUTUP	95
A. KESIMPULAN	95
B. SARAN.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian terdahulu	30
Tabel 2. Kondisi Demografi Desa Belang-Belang	47
Tabel 3. Kondisi Geografi Desa Belang-Belang	47
Tabel 4. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Belang-Belang	48
Tabel 5. Kondisi Ekonomi Berdasarkan Mata Pencaharian di desa Belang- Belang	50
Tabel 6. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.....	51
Tabel 7. Data Identitas Informan Desa Belang-Belang	56
Tabel 8. Dampak Ekonomi masyarakat Desa Belang-Belang sebelum dan selama pandemi Covid-19	60
Tabel 9. Fungsi Manifes dan Fungsi Laten BLT Dana Desa terhadap masyarakat Desa Belang-Belang.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Kesesuaian Kortzen	22
Gambar 2. Skema Kerangka Konseptual	38
Gambar 3. Kantor Desa Belang-Belang	103
Gambar 4. Hasil Perkebunan Masyarakat	103
Gambar 5. Kegiatan Wawancara Bersama Informan	103
Gambar 6. Kegiatan Wawancara Bersama Informan	104
Gambar 7. Kegiatan Wawancara Bersama Informan	104
Gambar 8. Kegiatan Wawancara Bersama Informan	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman wawancara	102
Lampiran 2. Dokumentasi	103
Lampiran 3. Surat izin Penelitian	105
Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu corona virus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut *Coronavirus disease 2019* (COVID-19). Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah hampir seluruh negara di dunia telah terjangkit virus satu ini. (Data WHO, 11 Januari 2020) (Yuliana, 2020).

Indonesia pertama kali melaporkan kasus konfirmasi Covid-19 pada tanggal 2 maret 2020 dan sejak saat itu jumlah penambahan kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat hingga saat ini Jumlah pasien yang terpapar Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah. Berdasarkan data pemerintah, hingga selasa_(9/2/2021), jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 1.174.779 orang, terhitung sejak diumumkan nya pasien pertama pada 2 Maret 2020 (Sari, 2021).

Pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi, termasuk pelaku usaha. Badan Pusat Statistik telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I (Januari- Maret) 2020 hanya tumbuh 2,97%. Angka ini melambat dari 4,97% pada Kuartal IV 2019. Bahkan, pertumbuhan jauh di bawah pencapaian Kuartal I 2019 yang mencapai 5,07%. Dan pada Kuartal II Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%. Angka itu

berbanding terbalik dengan kuartal II Tahun 2019 sebesar 5,05% (CNN Indonesia, 2020).

Pemerintah telah mengalokasikan total biaya penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,20 triliun yang dialokasikan untuk enam sektor. Total realisasi hingga minggu pertama Agustus adalah Rp 151,25 triliun atau 21,8% dari pagu program Pemulihan Ekonomi Nasional (kemenkeu. go.id, 2020). Beberapa langkah dilakukan oleh pemerintah untuk memperkecil dampak pada ketiga sektor (kesehatan, sosial ekonomi, dan dunia usaha). Di bidang kesehatan misalnya, pemerintah sudah memberikan dukungan peralatan bagi tenaga medis, pembuatan RS darurat hingga mengupayakan RS rujukan untuk pasien Covid-19. Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, realisasi program PEN untuk bidang kesehatan baru sekitar Rp6,3 triliun dari pagu Rp87,55 triliun. Realisasi ini untuk insentif kesehatan pusat dan daerah Rp 1,7 triliun, santunan kematian tenaga Kesehatan Rp12,9 triliun, penyaluran gugus tugas Covid-19 Rp3,2 triliun dan insentif bea masuk Kesehatan Rp1,4 triliun.

Selanjutnya, pemerintah juga sudah memberikan jaring pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Tujuannya agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi pada masa pandemi. Realisasi untuk perlindungan sosial sebesar Rp85,3 triliun dari pagu Rp203,91 triliun. Anggaran yang sudah terealisasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp26,6 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Rp8,3 triliun, kartu sembako Rp25,5 triliun, program pra kerja Rp2,4

triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp2,9 triliun, bantuan tunai non-Jabodetabek Rp16,5 triliun dan diskon listrik Rp3,1 triliun (Yuniarta, 2020).

Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antargenerasi. Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan (Asmanto & dkk, 2020).

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi COVID-19 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19 (BAPPENAS, 2020).

Bantuan langsung tunai (BLT) pada awalnya mulai terlaksana melalui Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005, tentang “pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin” dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2008, tentang “pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran”. Tujuan yang diharapkan melalui kebijakan program ini adalah dapat menjawab persoalan kemiskinan di Indonesia, sebagai akibat dari segenap

perubahan yang telah terjadi, baik secara nasional maupun global. Sebagai suatu program dan kebijakan nasional, program BLT mempunyai latar belakang pelaksanaan yang sistematis, baik secara deskriptif analisis kondisional maupun deskriptif operasional perundang-undangan. Setelah Pemerintah memutuskan untuk menaikkan BBM, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi kebijakan turunan dari kebijakan kenaikan BBM tersebut kebijakan BLT yang diluncurkan pemerintah ini, menuai banyak protes mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, mahasiswa, dan tokoh-tokoh masyarakat baik nasional maupun daerah. Kebijakan yang sama juga pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2005, ketika pemerintah menaikkan BBM sebesar 126 persen (Arib & Risfail, 2016).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki tujuan yang jelas dan sederhana: menambah konsumsi bagi rumah tangga miskin yang menghadapi kenaikan harga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2005 pemotongan subsidi menaikkan harga bahan bakar rumah tangga dengan rata-rata lebih dari 125 persen dengan kenaikan bahan bakar bensin, minyak tanah, dan solar (solar) masing-masing sebesar 88, 186, dan 105 persen. BLT, bantuan langsung tunai dalam empat kali angsuran selama satu tahun, yang didanai dari penghematan anggaran tersirat dari pengurangan subsidi, dalam banyak hal merupakan tanggapan Pemerintah Indonesia yang paling signifikan terhadap kenaikan harga bahan bakar yang diprogramkan.

BLT dirancang sebagai dukungan pendapatan darurat; itu tidak dirancang untuk mempengaruhi perilaku rumah tangga atau secara permanen menurunkan tingkat kemiskinan. Transfer BLT bersifat sederhana (sekitar 15 persen dari rata-rata

anggaran konsumsi rumah tangga target), sementara, dan tidak bersyarat dan tujuan program adalah untuk memberikan dukungan pendapatan selama masa darurat. BLT tidak bisa dan tidak menangani perilaku rumah tangga atau korelasi kemiskinan. Program yang diperkenalkan pada era yang sama, seperti keringanan biaya pendidikan dan kesehatan, pekerjaan umum, dan bantuan tunai bersyarat lebih cocok untuk tujuan tersebut.

Kelemahan dalam manajemen program dan operasi menyebabkan hasil yang tidak diinginkan. Misalnya, pemotongan pembayaran adalah hal biasa dan meningkat seiring waktu. Pedoman BLT, manual, dan pembagian kewenangan hanya berlaku selama manfaat BLT diterima oleh kantor PT Pos. Pertukaran selanjutnya tidak diatur dan penerima manfaat atau anggota masyarakat mungkin tidak menerima informasi yang cukup untuk memantau tahap ini secara efektif atau mengomunikasikan penyimpangan. Akibatnya, dana BLT terkadang dipotong dan terkadang diserahkan secara sukarela untuk layanan yang berbeda atau untuk tujuan yang berbeda. Penerima mengalami pemotongan baik oleh petugas kantor pos maupun pejabat masyarakat (World Bank, 2012).

Pada tahun 2020 BLT Kembali muncul dalam terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perpu tersebut disebutkan

bahwa yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 (Asmanto & dkk, 2020).

PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) merupakan strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi dan telah diterapkan di beberapa daerah/kota. Pemberlakuan PSBB tersebut mengubah seluruh aktivitas atau kegiatan masyarakat khususnya pekerjaan publik harus dilakukan di rumah secara virtual. Menurut WHO (2020) Penetapan aturan sebagai langkah pemerintah menghentikan penyebaran Covid-19 sebaiknya juga dapat mengantisipasi dampak yang terjadi setelah pelaksanaan aturan tersebut. Pemerintah juga harus menyeimbangkan manfaat dan konsekuensi negatif dari setiap intervensi dan menerapkan strategi untuk mendorong keterlibatan masyarakat, mendapatkan kepercayaan dan membatasi kerugian sosial atau ekonomi.

Ketidakmampuan masyarakat beradaptasi dengan peraturan pemerintah dalam menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menjadi masalah baru akibat pandemi Covid-19 khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Dampak sosial ekonomi yang terjadi dengan pemberlakuan aturan tersebut menjadi polemik bagi masyarakat di Indonesia. Penerapan PSBB diharapkan tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat dalam penanggulangan wabah tapi juga ada upaya dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat kelas menengah ke bawah banyak yang kehilangan mata pencaharian karena jumlah pekerja yang di PHK meningkat setelah upaya PSBB diterapkan, pekerja sektor

informal seperti buruh harian, nelayan, petani, pedagang kaki lima dan pekerja kasar lainnya yang paling rentan terkena dampak pandemi Covid-19 mereka kehilangan pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan dampak Covid-19 ternyata memang sangat luas pada sektor tenaga kerja. Kementerian ketenagakerjaan mencatat bahwa setidaknya ada 2 juta lebih pekerja di seluruh Indonesia yang terkena dampak langsung wabah Covid-19 (Liputan6.com). Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi yang sangat tajam dan berdampak besar kepada kesejahteraan hidup masyarakat karena adanya pembatasan gerak sehingga mengakibatkan hilangnya pekerjaan secara luas khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah.

Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian desa. Hal tersebut dikarenakan sekitar 70,53% pekerja di sektor informal, termasuk pertanian, mengalami penurunan pendapatan (BPS, 2020). Lebih lanjut, Covid-19 menyebabkan produktivitas tenaga kerja dan hasil produksi pertanian menurun, dan meningkatkan biaya perdagangan. Selain itu, Covid-19 juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat pedesaan karena sebagian besar orang dalam pengawasan (ODP) paling banyak berasal dari pedesaan. Kondisi tersebut terjadi karena pertanian merupakan pekerjaan yang perlu dilakukan secara berkelompok dan kondisi tersebut merupakan salah satu jalur penularan Covid-19. Kerentanan penularan Covid-19 tersebut terlebih karena kondisi masyarakat desa yang sebesar 31,1% berusia di atas 40 tahun, yang rentan tertular Covid-19 dengan tingkat kematian 10–14%. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya mencegah penularan Covid-19 di desa, dengan

menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengikuti Pemerintah Daerah (Kab/Kota) setempat. Di sisi lain, PSBB menghambat aktivitas masyarakat desa, termasuk bagi pekerja di sektor pertanian. Akibatnya, mata pencaharian masyarakat desa menghilang. Padahal, pendapatan dari pekerjaan ini merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Lebih lanjut, Covid-19 juga berdampak pada penurunan harga jual hasil pertanian masyarakat desa, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi (Zakariya, 2020).

Salah satu Desa yang terdampak dari peraturan pembatasan sosial ini adalah Desa Belang-belang yang berada di kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju sendiri pun merupakan kabupaten kedua tertinggi jumlah kasus covid-19 di provinsi Sulawesi barat dengan jumlah pasien positif sebanyak 2.737 orang per 28 agustus 2021. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Covid-19 telah cukup banyak mempengaruhi perekonomian desa maka dimunculkanlah program BLT-Dana Desa oleh pemerintah sebagai jaring pengaman sosial untuk masyarakat pedesaan, lantas hal ini menimbulkan pertanyaan untuk peneliti mengenai bagaimana program BLT-Dana Desa dapat lebih baik dan lebih tepat sasaran dibandingkan program-program BLT sebelumnya yang banyak dinilai gagal dikarenakan banyaknya salah sasaran dan pungli-pungli yang terjadi dan bagaimana pemerintah desa serta masyarakat penerima bantuan memfungsikan program BLT-Dana Desa untuk membuat kehidupan di desa lebih baik dalam mengurangi dampak dari Covid-19 dan peraturan yang dibawa bersamanya.

Desa Belang-Belang merupakan daerah terluas di kecamatan Kalukku dan merupakan salah satu desa dengan penduduk yang paling banyak di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dengan mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakatnya yang tinggi antar desa dengan ibu kota kecamatan dan ibu kota Mamuju yang mana dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan sosial yang membuat masyarakat terpaksa harus mengurangi pekerjaannya yang membuat masyarakat desa Belang-Belang merasakan dampak yang cukup besar di masa pandemic Covid-19 ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dengan berbagai data-data terkait maka dirasa perlu untuk dikaji lebih mendalam mengenai bagaimana dampak Covid-19 terhadap kondisi sosial masyarakat desa dan bagaimana bentuk pengimplementasian dan fungsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk masyarakat. Maka penulis merasa perlu dilakukan penelitian dengan judul “**Fungsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Belang-belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dampak Pandemi Covid-19 terhadap masyarakat Desa Belang-Belang?
2. Bagaimana fungsi manifes dan fungsi laten Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap masyarakat Desa Belang-Belang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Dampak Pandemi Covid-19 terhadap masyarakat Desa Belang-Belang.
2. Untuk mendeskripsikan fungsi manifes dan fungsi laten Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap masyarakat Desa Belang-Belang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Akademis

Secara akademis diharapkan dapat menjadi pijakan serta referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan permasalahan serupa.

2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, serta dapat membantu sebagai bahan informasi dan bahan mengambil kebijakan mengenai fungsi bantuan langsung tunai dana desa atau bantuan serupa lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Struktural Fungsional

Davis, (dalam Marzali, 2014) selama beberapa dasawarsa yang lalu, teori struktural-fungsionalisme telah merajai kajian antropologi dan dan sosiologi di Dunia Barat, sehingga Kingsley Davis berani mengatakan bahwa struktural-

fungsionalisme adalah sama dan sebangun dengan antropologi dan sosiologi. Di Inggris, teori ini mencapai puncak pencapaiannya dalam dasawarsa 1930 dan 1950, dalam masa mana struktural-fungsionalisme dikatakan sebagai identik dengan British Social Anthropology. Pelopornya yang terkenal disana adalah Radcliffe-Brown (R-B) dan Malinowski. Dari Inggris, pendekatan ini dibawa oleh pelopornya, R-B, menyebrang ke Amerika dan diperkenalkan ke jurusan Sosiologi dan Antropologi di Chicago University. Dua diantara pengikutnya yang terkenal di universitas itu pada masa itu adalah Fred Eggan dan Robert Redfield. Teori ini di Amerika mencapai puncaknya pada tahun 1950 an, Ketika Talcott Parsons mengembangkannya dalam bentuk yang lebih canggih dan kompleks di Department of Social Relations, Harvard University. Namun demikian, sejak akhir 1960 an, teori ini mulai mendapat banyak kritikan yang keras dan tajam, dan dari situ muncul teori-teori sosiologi baru yang dianggap lebih canggih.

Struktural-fungsionalisme lahir sebagai reaksi terhadap teori evolusioner. Jika tujuan dari kajian-kajian evolusioneri adalah untuk membangun tingkat-tingkat perkembangan budaya manusia, maka tujuan dari kajian-kajian struktural-fungsionalisme adalah untuk membangun suatu sistem sosial, atau struktur sosial, melalui pengajian terhadap pola hubungan yang berfungsi antar individu-individu, antara kelompok-kelompok, atau antara institusi-institusi sosial di dalam suatu masyarakat, pada suatu kurun masa tertentu. Jadi pendekatan evolusioneri lebih bersifat historis dan diakronis, sedangkan pendekatan struktural-fungsional lebih bersifat statis dan sinkronis.

Meskipun eksplanasi secara fungsional dalam kajian-kajian sosial telah

terlihat dalam banyak karya-karya Spencer dan Comte, namun Durkheim-lah yang telah meletakkan dasarnya secara tegas dan jelas. Peranan Durkheim ini diakui secara eksplisit oleh R-B. Durkheim secara jelas mengatakan bahwa fenomena sosial seharusnya di eksplain melalui dua pendekatan pokok yang berbeda, yaitu pendekatan historis dan pendekatan fungsional. Analisa fungsional berusaha menjawab pertanyaan mengapa suatu item-item sosial tertentu mempunyai konsekuensi tertentu terhadap operasi keseluruhan sistem sosial. Sementara itu analisa historis berusaha menjawab mengapa item sosial tersebut, bukan item-item sosial yang lain, secara historis yang mempunyai fungsi tersebut (Marzali, 2014).

Fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan ‘struktural fungsional’ merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Fungsionalisme struktural atau ‘analisa sistem’ pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur (Kinloch, 2009).

Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi (Haryanta & Sujatmoko, 2012).

Dalam paradigma struktural fungsional semua unsur pembentuk masyarakat terjalin satu sama lain yang dikenal dengan sistem. Sehingga jika ada salah satu unsurnya tidak bekerja maka masyarakat tersebut akan terganggu. Dengan adanya saling ketergantungan, kerjasama menunjukkan bahwa masyarakat terintegrasi utuh dan bertahan lama.

Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan fungsi dan mempunyai fungsi. Secara kualitatif fungsi dilihat dari segi kegunaan dan manfaat seseorang, kelompok, organisasi atau asosiasi tertentu.

Fungsi juga menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan "masih berfungsi" atau "tidak berfungsi." Fungsi tergantung pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh, dan lain-lain. Secara kuantitatif, fungsi dapat menghasilkan sejumlah tertentu, sesuai dengan target, proyeksi, atau program yang telah ditentukan (Ritzer, 2012).

Bagaimana berfungsinya sebuah struktur menjadi sasaran penjelasan teori struktural fungsional. Setiap struktur, baik struktur mikro maupun struktur makro masyarakat, akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Asumsi dasar struktural fungsional menyatakan bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan nilai bersama yang mampu mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan

anggota. Setiap anggota masyarakat berada atau hidup dalam struktur sosial yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Orientasi dasar paradigma fungsionalisme struktural adalah keteraturan ekuilibrium harmoni dan integrasi.

Asumsi dasar yang digunakan dalam teori struktural fungsional dapat kita fahami dari apa yang dijelaskan Ralf Dahrendorf, sebagaimana dipaparkan (Damsar, 2017) sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif mantap dan stabil. Kegiatan setiap individu yang dilakukan secara setiap hari, melakukan fungsi masing-masing dan saling berinteraksi di antara mereka, selalu dilakukan setiap hari, relatif sama dan hampir tidak berubah.
2. Elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik. Elemen-elemen yang membentuk struktur memiliki kaitan dan jalinan yang bersifat saling mendukung dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.
3. Setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem. Semua elemen masyarakat yang ada memiliki fungsi. Fungsi tersebut memberikan sumbangan bagi bertahannya suatu struktur sebagai suatu sistem.
4. Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai diantara para anggota anggotanya. Konsensus nilai tersebut berasal baik dari kesepakatan yang telah ada dalam suatu masyarakat seperti adat kebiasaan, tata perilaku dan sebagainya maupun kesepakatan yang dibuat baru.

Teori Struktural Fungsional Robert Merton

Merton (dalam Ritzer, 2012) mengkritik hal yang dia anggap sebagai tiga dalil dasar analisis fungsional seperti yang dikembangkan oleh para antropolog seperti Malinowski dan Radcliffe-Brown. Pertama ialah dalil kesatuan fungsional masyarakat. Dalil tersebut menganggap bahwa semua kepercayaan sosial dan budaya dan praktik yang distandarkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai suatu keseluruhan dan juga sebagai individu-individu di dalam masyarakat. Pandangan itu menyiratkan bahwa berbagai bagian bagian sistem sosial nantinya akan menunjukkan level integrasi yang tinggi. Akan tetapi, Merton berketetapan, kendati hal itu hal itu mungkin benar dalam masyarakat primitif yang kecil, generalisasi itu dapat diperluas kepada masyarakat-masyarakat yang lebih besar dan lebih kompleks.

Dalil kedua ialah fungsionalisme universal. Yakni, diargumenkan bahwa semua bentuk sosial budaya yang distandarkan mempunyai fungsi-fungsi positif. Merton berargumen bahwa hal tersebut bertolak belakang dengan yang kita jumpai di dunia nyata. Jelas bahwa tidak setiap struktur, adat kebiasaan, ide, kepercayaan dan seterusnya mempunyai fungsi-fungsi positif. Contohnya Nasionalisme fanatic bisa sangat tidak bermanfaat di dunia yang mempunyai segudang senjata nuklir.

Ketiga adalah dalil kebutuhan mutlak. Argumennya disini ialah bahwa semua aspek masyarakat yang distandarisasi tidak hanya mempunyai fungsi-fungsi positif, tetapi juga menggambarkan bagian-bagian dari cara kerja keseluruhan yang mutlak ada. Dalil tersebut menghasilkan ide bahwa semua struktur dan fungsi secara fungsional adalah untuk masyarakat. Tidak ada struktur-struktur dan fungsi-fungsi lain yang dapat bekerja sebaik struktur-struktur dan fungsi-fungsi yang dijumpai di

dalam masyarakat sekarang ini. Kritik Merton selanjutnya kepada Parsons, ialah bahwa setidaknya kita harus bersedia mengakui bahwa ada berbagai alternatif struktural dan fungsional yang terdapat di dalam masyarakat.

Pendirian Merton ialah bahwa semua dalil fungsional tersebut bersandar pada penegasan-penegasan non empiris yang didasarkan pada sistem-sistem teoritis abstrak. Minimalnya, sosiolog bertanggung jawab untuk memeriksa masing-masing penegasan itu secara empiris. Kepercayaan Merton bahwa pengujian-pengujian empiris, bukan pernyataan-pernyataan teoritis, sangat penting bagi analisis fungsional, menuntunnya mengembangkan “paradigma” analisis fungsionalnya sebagai suatu panduan untuk penyatuan teori dan riset.

Sejak awal Merton menjelaskan bahwa analisis fungsional-struktural berfokus pada kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, masyarakat-masyarakat dan kebudayaan-kebudayaan. Dia menyatakan bahwa setiap objek yang dapat ditundukkan kepada analisis fungsional-struktural harus “menggambarkan suatu item yang distandarkan” (yakni terpola dan berulang). Dia memaksudkan hal-hal seperti “peran-peran sosial, pola-pola kelembagaan, proses-proses sosial, pola-pola budaya, emosi-emosi yg terpola secara budaya, norma-norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, alat-alat pengendalian sosial, dan sebagainya”.

Para fungsionalis struktural awal cenderung berfokus nyaris seluruhnya pada fungsi-fungsi struktur atau Lembaga sosial yang satu untuk yang lainnya. Akan tetapi, dalam pandangan Merton, para analis awal cenderung mengacaukan motif-motif subjektif individu dengan fungsi-fungsi struktur atau Lembaga. Fungsionalis struktural harusnya berfokus pada fungsi-fungsi sosial daripada motif-motif

individual. Menurut Merton (dalam Ritzer, 2012), fungsi-fungsi didefinisikan sebagai “konsekuensi-konsekuensi yang diamati yang dibuat untuk adaptasi atau penyesuaian suatu sistem tertentu”. Akan tetapi, ada suatu bias ideologis yang jelas ketika orang hanya berfokus pada adaptasi atau penyesuaian, karena mereka selalu merupakan konsekuensi-konsekuensi positif. Perlu dicatat bahwa fakta sosial yang satu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi negatif untuk fakta sosial yang lainnya. Untuk mengoreksi penghilangan serius tersebut yang terjadi di dalam fungsionalisme struktural awal, Merton mengembangkan ide mengenai disfungsi. Sebagaimana struktur-struktur atau Lembaga-lembaga dapat berperan dalam pemeliharaan bagian-bagian lain sistem sosial, mereka juga dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi negatif untuknya.

Merton juga mengajukan ide nonfungsi, yang dia definisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang benar-benar tidak relevan dengan sistem yang dipertimbangkan. Bentuk-bentuk sosial “sisa-sisa” dari masa-masa historis yang lebih awal mungkin termasuk di sini. Meskipun mereka mungkin mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau negatif di masa silam, mereka tidak mempunyai efek yang signifikan bagi masyarakat kontemporer.

Konsep Fungsi Manifes dan Laten Merton

Merton juga memperkenalkan konsep fungsi nyata dan laten. Kedua istilah itu juga telah menjadi tambahan penting bagi analisis fungsional. Dalam istilah-istilah yang sederhana, fungsi-fungsi nyata adalah yang disengaja, sementara fungsi-fungsi laten tidak disengaja. Ide itu terkait dengan konsep Merton yang lain

konsekuensi-konsekuensi yang tidak diantisipasi. Tindakan-tindakan mempunyai konsekuensi yang disengaja maupun tidak disengaja.

Merton menjelaskan bahwa konsekuensi-konsekuensi yang tidak diantisipasi dan fungsi-fungsi laten tidak sama. Fungsi-fungsi laten adalah satu tipe konsekuensi yang tidak diantisipasi, tipe yang bermanfaat untuk sistem yang ditunjuk. Akan tetapi, ada dua tipe lainnya konsekuensi yang tidak diantisipasi: “konsekuensi-konsekuensi disfungsional untuk suatu sistem yang ditunjuk, dan hal itu terdiri dari disfungsi-disfungsi laten” dan “konsekuensi-konsekuensi tidak relevan bagi sistem yang mereka pengaruhi baik secara fungsional maupun disfungsional... konsekuensi-konsekuensi nonfungsional (Ritzer, 2012).

B. Perubahan Sosial

Ada yang memandang masyarakat merupakan sesuatu yang life dan karena itu pastilah berkembang dan kemudian berubah. Karena itu, kajian utama perubahan sosial mestinya juga menyangkut keseluruhan aspek kehidupan masyarakat atau harus meliputi semua fenomena sosial yang menjadi kajian sosiologi. Cara pandang demikian mengindikasikan bahwa perubahan sosial mengandung perubahan dalam tiga dimensi: struktural, kultural, dan interaksional. Jadi, orang baru bisa menyebut telah terjadi perubahan sosial manakala telah dan sedang terjadi perubahan pada ketiga dimensi dimaksud. Atau singkatnya, perubahan sosial tak lain merupakan perubahan yang terjadi dalam organisasi sosial.

Herbert Blumer melihat perubahan sosial sebagai usaha kolektif untuk menegakkan terciptanya tata kehidupan baru. Ralp Tunner dan Lewis M. Killin (1962),

perubahan sosial sebagai kolektivitas yang bertindak terus menerus, guna meningkatkan perubahan dalam masyarakat atau kelompok.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa perubahan sosial itu merujuk kepada perubahan suatu fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia mulai dari tingkat individual hingga tingkat dunia (Narwoko & Suyanto, 2007).

Ahli lain berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti misalnya perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, atau kebudayaan. Kemudian, ada pula yang berpendapat bahwa perubahan-perubahan sosial bersifat periodik dan non periodik. Pendapat-pendapat tersebut pada umumnya menyatakan bahwa perubahan merupakan lingkaran kejadian-kejadian.

Beberapa sosiolog berpendapat bahwa ada kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan. Misalnya kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis, atau biologis menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya (William F. Ogburn menekankan pada kondisi teknologis). Sebaliknya ada pula yang mengatakan bahwa semua kondisi tersebut sama pentingnya, satu atau semua akan menelorkan perubahan-perubahan sosial (Soekanto, 2007).

Dalam teori evolusioner mengungkapkan, bahwa semua teori evolusioner menilai bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap yang dilalui oleh semua masyarakat. Semua masyarakat itu melalui urutan pentahapan yang sama dan bermula dari tahap perkembangan awal menuju ke tahap perkembangan terakhir. Di samping, itu,

teori-teori evolusioner menyatakan bahwa manaka tahap terakhir telah tercapai, maka pada saat itu perubahan evolusioner pun berakhir.

Para penganut teori siklus juga melihat adanya sejumlah tahap yang harus dilalui oleh masyarakat, tetapi mereka berpandangan bahwa proses peralihan masyarakat bukannya berakhir pada tahap 'terakhir' yang sempurna, melainkan berputar kembali ke tahap awal untuk peralihan selanjutnya.

Proses perubahan terdiri dari tiga macam, yaitu penemuan, invensi, dan difusi.

Penemuan merupakan persepsi manusia, yang dianut secara bersama, mengenai suatu aspek kenyataan yang semula sudah ada. Penemuan merupakan tambahan pengetahuan terhadap perbendaharaan pengetahuan dunia yang telah diverifikasi. Penemuan menambahkan sesuatu yang baru pada kebudayaan karena meskipun kenyataan tersebut sudah lama ada, namun kenyataan itu baru menjadi bagian dari kebudayaan pada saat kenyataan tersebut ditemukan.

Invensi seringkali disebut sebagai suatu kombinasi baru atau cara penggunaan baru dari pengetahuan yang sudah ada. Serta proses difusi adalah perubahan sosial masyarakat yang dikenal, yakni penyebaran unsur-unsur budaya dari suatu kelompok ke kelompok lainnya. Difusi berlangsung baik di dalam masyarakat maupun antarmasyarakat.

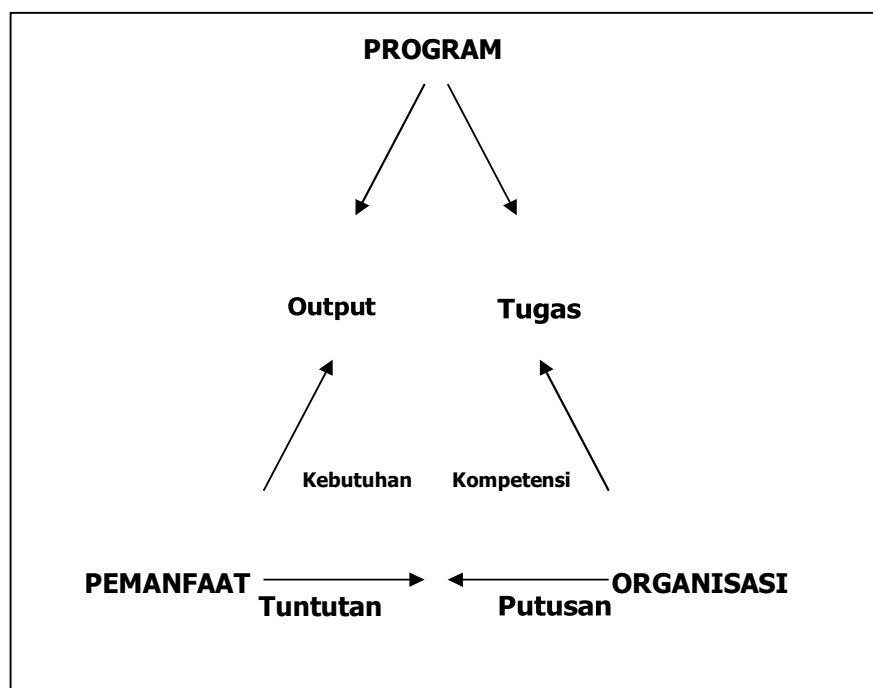
Difusi terjadi manakala beberapa masyarakat saling berhubungan. Masyarakat juga dapat mengelakkan diri dari difusi dengan dengan cara mengeluarkan larangan dilakukannya dengan kontak masyarakat lain (Hunt, 1984).

C. Konsep Implementasi

Edwards III (dalam Imronah, 2009) menyatakan, tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada *standard operating procedure* yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Korten (dalam Tarigan, 2000) membuat Model Kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.



Gambar 1. Model Kesesuaian Korten

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian

antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

D. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Salah satu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan atau memajukan kesejahteraan umum adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan langsung tunai (BLT) mulai terlaksana melalui Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005, tentang “pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin” dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2008, tentang “pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran”. Tujuan yang diharapkan melalui kebijakan program ini adalah dapat menjawab persoalan kemiskinan di Indonesia, sebagai akibat dari segenap perubahan yang telah terjadi, baik secara nasional maupun global.

Sebagai suatu program dan kebijakan nasional, program BLT mempunyai latar belakang pelaksanaan yang sistematis, baik secara deskriptif analisis kondisional maupun deskriptif operasional perundang-undangan. Setelah Pemerintah memutuskan untuk menaikkan BBM, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi kebijakan turunan dari kebijakan kenaikan BBM tersebut kebijakan BLT yang diluncurkan pemerintah ini, menuai banyak protes mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, mahasiswa, dan tokoh-tokoh masyarakat baik nasional maupun

daerah. Kebijakan yang sama juga pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2005, ketika pemerintah menaikkan BBM sebesar 126 persen (Arib & Risfail, 2016).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki tujuan yang jelas dan sederhana: menambah konsumsi bagi rumah tangga miskin yang menghadapi kenaikan harga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2005 pemotongan subsidi menaikkan harga bahan bakar rumah tangga dengan rata-rata lebih dari 125 persen dengan kenaikan bahan bakar bensin, minyak tanah, dan solar masing-masing sebesar 88, 186, dan 105 persen. BLT, bantuan langsung tunai dalam empat kali angsuran selama satu tahun, yang didanai dari penghematan anggaran tersirat dari pengurangan subsidi, dalam banyak hal merupakan tanggapan Pemerintah Indonesia yang paling signifikan terhadap kenaikan harga bahan bakar yang diprogramkan ini.

BLT dirancang sebagai dukungan pendapatan darurat; itu tidak dirancang untuk mempengaruhi perilaku rumah tangga atau secara permanen menurunkan tingkat kemiskinan. Transfer BLT bersifat sederhana (sekitar 15 persen dari rata-rata anggaran konsumsi rumah tangga target), sementara, dan tidak bersyarat dan tujuan program adalah untuk memberikan dukungan pendapatan selama masa darurat. BLT tidak bisa dan tidak menangani perilaku rumah tangga atau korelasi kemiskinan. Program yang diperkenalkan pada era yang sama, seperti keringanan biaya pendidikan dan kesehatan, pekerjaan umum, dan bantuan tunai bersyarat lebih cocok untuk tujuan tersebut (World Bank, 2012).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Dalam peraturan Menteri keuangan nomor 40 tahun 2020 (PMK 40/2020), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya.

Adapun calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan/Bantuan Pangan Non Tunai/pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan);
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

E. Konsep Pedesaan

1. Pengertian Pedesaan

Kata “pedesaan” sepadan dengan kata *rural* dalam bahasa Inggris. Dalam pemakaiannya sehari-hari definisi dari perkataan tersebut sulit dikemukakan secara utuh, karena konsep pedesaan berbeda dari satu kawasan ke kawasan lain, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain.

Dari segi geografis, Bintarto (dalam Susilawati, 2012) mengemukakan bahwa desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia

dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu dapat dilihat pada unsur-unsur fisiografi, sosial dan ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Sementara itu Sutardjo Kartohadikusumo menyatakan bahwa desa adalah satu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Paul H. Landis (dalam Susilawati, 2012) mencoba memberikan batasan pengertian pedesaan sebagai berikut:

1. Untuk maksud statistik, pedesaan adalah suatu tempat dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang
2. Dari kajian psikologi sosial, pedesaan adalah daerah dimana pergaulan masyarakatnya ditandai oleh derajat intimitas yang tinggi
3. dari kajian ekonomi, pedesaan adalah daerah dimana pusat perhatiannya pada bidang perhatian.

Di Indonesia, Batasan landis kurang tepat dipakai, sebab jumlah penduduk satu desa di Jawa misalnya melebihi 11.445 orang, tetapi keadaannya masih bersifat pedesaan. Sebaliknya, kondisi dikota-kota besar pun mencirikan sifat-sifat pedesaan.

2. Tipologi Masyarakat Desa

Tipologi tentang masyarakat desa dapat ditinjau dari beberapa segi menurut Jefta (dalam Susilawati, 2012), yaitu:

- a. Dari segi kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

- Desa pertanian, dimana semua anggota masyarakatnya terlibat di bidang pertanian
- Desa industri, dimana pendapatan masyarakatnya lebih banyak berhubungan dengan industri kecil atau kerajinan yang ada di desa tersebut
- Desa nelayan atau desa petani, yaitu pusat kegiatan dari seluruh anggota masyarakatnya yang berusaha di bidang perikanan (pantai, laut dan darat)

b. Dari segi pola pemukiman

- *Farm village type*, yaitu suatu desa yang didiami secara bersama dengan sawah ladang di sekitar tempat tersebut. Tipe ini kebanyakan terdapat di Asia Tenggara termasuk Indonesia khususnya Jawa. Tradisi sangat dipegang kuat, hubungan sesama individu dalam proses produksi usaha tani telah bersifat komersial karena masuknya teknologi modern.
- *Nebulous farm village type*, yaitu suatu desa dimana sejumlah orang yang berdiam di suatu tempat dan sebagian lainnya menyebar di luar tempat bersama sawah ladang mereka. Tipe ini kebanyakan terdapat di Asia Tenggara dan Indonesia, khususnya di Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan sebagian di Jawa. Di Kalimantan bisa juga dijumpai karena masih terdapat pola bertani atau berladang berpindah. Tradisi dan gotong royong serta kolektivitas sangat kuat di kalangan anggota masyarakat.

- *Arranged isolated farm village type*, yaitu suatu desa dimana orang berdiam disekitar jalan-jalan yang berhubungan dengan pusat perdagangan dan selebihnya adalah sawah dan ladang mereka. Tipe ini kebanyakan dijumpai di Negara-negara Barat. Tradisi disini kurang kuat, individualitas lebih menonjol, lebih berorientasi pada bidang perdagangan.
- *Pure isolated farm village type*, yaitu, desa dimana orang-orang berdiam tersebar bersama sawah ladang mereka masing-masing. Tipe ini kebanyakan di negara-negara barat. Tradisi kurang kuat, individualitas menonjol dan juga berorientasi perdagangan.

c. Dari Segi Perkembangan Masyarakat

- Desa tradisional (pradesa)

Tipe ini kebanyakan dijumpai pada masyarakat suku-suku terasing. Seluruh kehidupannya termasuk teknologi bercocok tanam, cara-cara pemeliharaan kesehatan, cara-cara memasak makanan dan sebagainya masih sangat tergantung pada alam sekitarnya. Pembagian kerja dibagi berdasarkan jenis kelamin, yaitu ada pekerjaan tertentu yang hanya boleh dikerjakan oleh wanita saja sedang laki-laki tidak, demikian pula sebaliknya

- Desa swadaya

yaitu desa yang memiliki kondisi yang relatif statis tradisional. Masyarakatnya sangat tergantung pada keterampilan dan kemampuan pemimpinnya. Kehidupan masyarakat sangat tergantung dengan alam

yang belum diolah dan dimanfaatkan secara baik. Susunan kelas dalam masyarakat masih bersifat vertikal dan statis serta kedudukan seseorang dinilai menurut keturunan dan luasnya kepemilikan tanah.

- Desa swakarya (desa peralihan)

Keadaan desa sudah dimulai disentuh oleh pembaharuan. Masyarakat sudah tidak bergantung lagi dengan pimpinan. Kaya, jasa dan keterampilan serta luasnya kepemilikan tanah sudah menjadi ukuran kedudukan seseorang. Mobilitas sosial baik secara vertikal maupun horizontal sudah mulai ada.

- Desa swasembada

Masyarakat telah maju karena sudah mengenal mekanisasi pertanian dan teknologi ilmiah. Unsur partisipasi masyarakat sudah efektif dan norma sosial selalu dihubungkan dengan kemampuan dan keterampilan seseorang. Selain itu, sudah ada pengusaha yang berani mengambil resiko dalam menanam modal.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Harwidiansyah (2011) UIN	Dampak bantuan langsung	Metode yang digunakan adalah	Berdasarkan hasil penelitian

	<p>ALAUDDIN MAKASSAR</p>	<p>tunai terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa</p>	<p>metode penelitian kualitatif deskriptif</p>	<p>mengenai dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat desa Maccini Baji kecamatan Bajeng kabupaten Gowa, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: 1. Dimata masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bahwa uang BLT dinilai hanya sebagai uang pembeli sembako, karena menurut masyarakat penerima BLT bahwa uang sebesar Rp. 100.000 perbulan itu hanya cukup untuk untuk membeli sembilan bahan pokok. Oleh karena itu menurut mereka, penerima BLT belum bisa sejahtera dengan hanya mengandalkan</p>
--	------------------------------	--	--	---

				<p>BLT.</p> <p>2.Masyarakat menilai bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah pemberian secara cuma-cuma oleh pemerintah, sehingga tidak jarang diantara mereka ingin mendapatkan BLT walaupun sebenarnya mereka tidak layak mendapatkannya . Oleh karena itu, baik tokoh masyarakat maupun pemerintah desa sama-sama memiliki pandangan bahwa pemberian BLT menjadikan masyarakat bersikap pasif, karena hanya menunggu pemberian dari pemerintah, dan juga pemberian BLT sebenarnya dapat menumbuhkan budaya kemiskinan. Karena ketika ada pembagian atau pendataan BLT masyarakat</p>
--	--	--	--	--

				<p>akan ramai-ramai menuntut bahwa mereka ingin didata untuk mendapatkan BLT juga.</p> <p>3. Dengan alasan di atas tokoh masyarakat maupun pemerintah desa sepakat mengatakan bahwa sebenarnya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kurang sejalan dengan semangat budaya dan bahkan agama.</p> <p>4. Baik tokoh masyarakat maupun pemerintah desa menilai bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>5. Walaupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat membantu masyarakat desa Maccini Baji</p>
--	--	--	--	--

				<p>khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti sembako, namun BLT dinilai tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Kenyataan ini dibuktikan dengan berbagai pernyataan dari masyarakat penerima BLT dan juga Tokoh Masyarakat setempat.</p>
2.	Carly Erfly Fernando Maun (2020)	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	<p>Dalam rangka penanganan dampak covid 19 khususnya dampak ekonomi, pemerintah pusat memberikan Bantuan Langsung Tunai yang diambil dari dana desa yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme dan waktu yang ditetapkan. Jika dilihat efektifitasnya dari program tersebut terkait dengan ketepatan waktu penyaluran BLT</p>

				<p>Dana Desa di Desa Talaitad, dapat disimpulkan sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada. Sedangkan dari sisi ketepatan menentukan pilihan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa telah dibantah oleh hukum tua dan berdasarkan hasil data sekunder dilapangan menyatakan demikian. Dan untuk aspek ketepatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT dan merupakan pelaku</p>
--	--	--	--	--

				langsung di lapangan.
3.	Refendy Paar Sofia dan Pangemanan Frans Singkoh (2021) Universitas Sam Ratulangi	Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan	Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif	<p>1. Secara organisasi kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang pada tahapan penerapannya oleh pemerintah desa. Tujuan BLT dana desa ini untuk penanganan dampak covid 19 khususnya dampak ekonomi, adapun mekanisme dan waktu yang ditetapkan, dalam ketepatan waktu pada penyaluran BLT Dana Desa di Desa Tokin Baru, peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran BLT Dana Desa sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada.</p> <p>2. Pada tingkat interpretasi atau tingkat pemahaman</p>

				<p>pelaksana kebijakan yakni pemerintah desa, peneliti menyimpulkan bahwa telah ada prosedur yang harus diikuti oleh aparat dan aparat pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur, dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa tidak terbukti dilapangan dan peneliti menganggap hanya kurangnya informasi yang benar kepada masyarakat sehingga menimbulkan kesalahpahaman saja.</p> <p>3. Dari aspek aplikasi dilapangan, peneliti menyimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur sudah tepat sasaran. Hal</p>
--	--	--	--	---

				tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT dan merupakan pelaku langsung di lapangan.
--	--	--	--	--

G. Kerangka Konseptual

Pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan masalah Kesehatan namun pandemi juga menimbulkan masalah-masalah sosial ekonomi diakibatkan adanya pembatasan pembatasan sosial yang dilakukan di Indonesia bahkan di seluruh dunia Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja.

Covid-19 juga telah berdampak pada kondisi perekonomian desa. Hal tersebut dikarenakan sekitar 70,53% pekerja di sektor informal, termasuk pertanian, mengalami penurunan pendapatan (BPS, 2020). Lebih lanjut, Covid-19 menyebabkan produktivitas tenaga kerja dan hasil produksi pertanian menurun, dan meningkatkan biaya perdagangan. Selain itu, Covid-19 juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat pedesaan karena sebagian besar orang dalam pengawasan (ODP) paling banyak berasal dari pedesaan. Kondisi tersebut terjadi karena pertanian merupakan pekerjaan yang perlu dilakukan secara berkelompok dan kondisi tersebut merupakan salah satu jalur penularan Covid-19.

Kerentanan penularan Covid-19 tersebut terlebih karena kondisi masyarakat desa yang sebesar 31,1% berusia di atas 40 tahun, yang rentan tertular Covid-19

dengan tingkat kematian 10–14%. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya mencegah penularan Covid-19 di desa, dengan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengikuti Pemerintah Daerah (Kab/Kota) setempat. Di sisi lain, PSBB menghambat aktivitas masyarakat desa, termasuk bagi pekerja di sektor pertanian. Akibatnya, mata pencaharian masyarakat desa menghilang. Padahal, pendapatan dari pekerjaan ini merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Lebih lanjut, Covid-19 juga berdampak pada penurunan harga jual hasil pertanian masyarakat desa, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi (Zakariya, 2020).

Penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana bentuk pengimplementasian dan fungsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Belang-belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.

Gambar 2. SKEMA KERANGKA KONSEPTUAL

